



KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD KOTA PEKALONGAN 2024

12 Januari 2023

Kepala BPKAD Kota Pekalongan

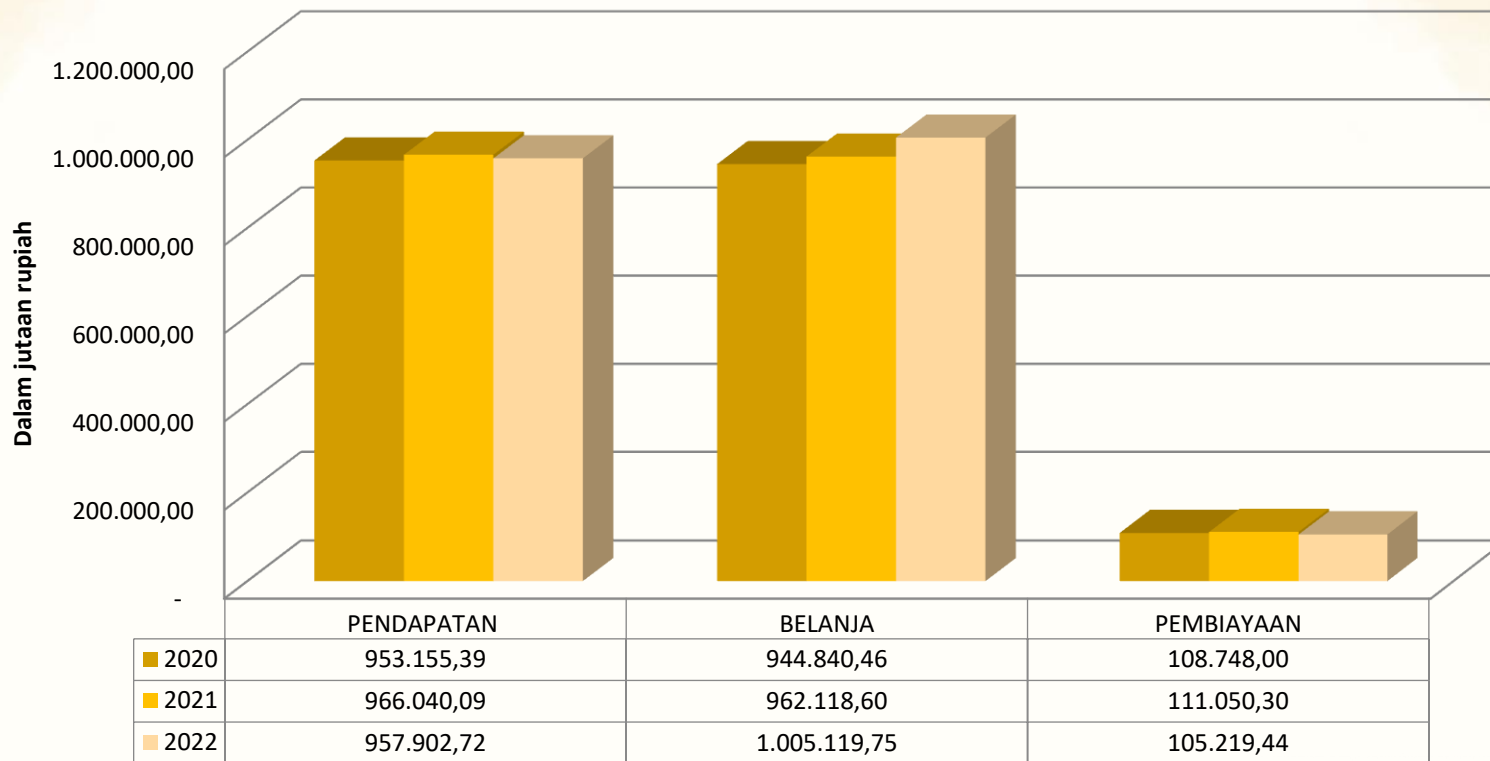


Kerangka Pendanaan, Pagu Indikatif dan Strategi Peningkatan Pendapatan Tahun 2024





Kinerja Keuangan 2020-2022





Kebijakan Perencanaan Pendapatan 2024



Pajak Daerah

dihitung berdasarkan :

- ❖ Perkiraan potensi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Hasil Kajian Unsoed)
- ❖ Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
- ❖ Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.



Retribusi Daerah

dihitung berdasarkan :

- ❖ Perkiraan potensi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Hasil Kajian Unsoed)
- ❖ Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
- ❖ Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

dihitung berdasarkan :

- ❖ estimasi perolehan laba dari BUMD tahun sebelumnya



Lanjutan Kebijakan Perencanaan.....



Lain-lain PAD yang sah

dihitung berdasarkan :

- ❖ Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
- ❖ Perkiraan suku bunga BI;
- ❖ Potensi aset yang disewakan;
- ❖ Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
- ❖ Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

dihitung berdasarkan :

- ❖ diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2023.



Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

dihitung berdasarkan :

- ❖ diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2023.



Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

URAIAN	REALISASI			APBD 2023	APBD 2024
	2020	2021	2022 Unaudited		
PENDAPATAN	953.155.394.615	940.097.908.832	957.902.724.668	967.818.978.000	971.819.392.017
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	229.867.935.361	235.005.944.795	253.068.504.515	240.805.592.000	247.056.006.017
Pendapatan Pajak Daerah	76.255.221.742	87.380.370.018	92.662.027.161	99.450.000.000	104.088.947.780
Hasil Retribusi Daerah	14.870.124.919	14.747.483.454	18.931.254.526	21.674.202.000	19.008.320.112
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.821.083.050	5.805.514.149	6.434.311.659	6.473.378.000	6.862.472.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132.921.505.650	127.072.577.174	135.040.911.169	113.208.012.000	117.096.266.125
PENDAPATAN TRANSFER	700.838.013.854	686.765.223.608	704.834.220.153	724.763.386.000	724.763.386.000
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	625.666.101.409	607.835.271.117	597.863.361.153	652.383.034.000	652.383.034.000
Bagi Hasil Pajak	27.182.869.066	32.286.144.200	30.825.734.086	28.174.327.000	28.174.327.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.780.895.008	2.665.115.437	3.054.973.339	1.669.797.000	1.669.797.000
Dana Alokasi Umum	433.354.907.000	426.399.738.000	424.427.248.179	447.688.903.000	447.688.903.000
Dana Alokasi Khusus	104.991.517.335	124.954.748.480	134.859.145.549	164.905.768.000	164.905.768.000
Dana Insentif Daerah	58.355.913.000	21.529.525.000	4.696.260.000	9.944.239.000	9.944.239.000
Transfer Pemerintah Provinsi	75.171.912.445	78.929.952.491	106.970.859.000	72.380.352.000	72.380.352.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	63.377.912.445	76.876.982.891	72.380.352.000	72.380.352.000	72.380.352.000
Bantuan Keuangan Provinsi	11.794.000.000	2.052.969.600	34.590.507.000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.449.445.400	18.326.740.429	-	2.250.000.000	-
Pendapatan Hibah	22.449.445.400	18.326.740.429	-	2.250.000.000	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-



Arah Kebijakan Pendapatan 2024

01 Implementasi dan Sosialisasi Perda Perwal tindak lanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD ;

03 Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya)

05 Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;

02 Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;

04 Pemberian Stimulus PBB

06 Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran)



Lanjutan Arah Kebijakan.....

07 Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;

08 Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;

09 Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;

10 Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah.

11 Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru.

12 Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;



Lanjutan Arah Kebijakan.....

13 Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

15 Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;

17 Peningkatan kordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

14 Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;

16 Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;

bangga
melayani
bangsa

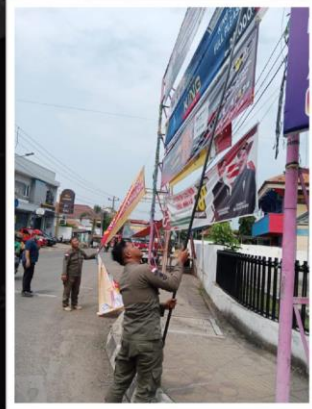
BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

Pekalongan



BPKAD Kota Pekalongan

PENERTIBAN REKLAME



BPKAD Kota Pekalongan

Danke!



Jalan Sriwijaya No 44 Pekalongan



0285 – 429451



bpkad.kotapkl



bkd.kotapkl@gmail.com



bakeuda.pekalongankota.go.id